



PENDAPATAN REGIONAL RIAU MENURUT PENGELUARAN 2008-2012



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO RIAU MENURUT PENGELUARAN 2008 - 2012

ISBN : 979 484 728 3
Nomor publikasi : 14.552.2013.8
Katalog BPS Provinsi Riau : 930.2004.14
Ukuran buku : 21 cm X 28 cm
Jumlah halaman : 50 + vii

Naskah
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Riau menurut Pengeluaran tahun 2008 – 2012 merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya. Penyajian publikasi ini ingin memberikan gambaran tentang perkembangan permintaan konsumsi barang dan jasa di wilayah Riau atau permintaan konsumsi barang dan jasa di luar wilayah Riau. Produk Domestik Regional Bruto Riau menurut Pengeluaran mencakup komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto, ekspor dan impor.

Kami telah berupaya memberikan kemudahan bagi para pengguna data mulai dari para eksekutif, legislatif, pebisnis, peneliti hingga kelompok masyarakat, untuk memanfaatkan publikasi ini dengan cara memberikan informasi tentang pertumbuhan ekonomi, dan komposisi atau peran dari setiap komponen yang membentuk Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran, serta indeks implisit dari setiap komponennya untuk informasi perubahan harga barang dan jasa. Pada publikasi ini ditampilkan konsep, definisi, metodologi dan cara penghitungan dari setiap komponen yang membentuk Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran.

Mengingat keterbatasan data dasar yang tersedia, dalam publikasi ini masih ditemui beberapa kekurangan, yang akan terus diupayakan untuk disempurnakan pada publikasi mendatang. Akhirnya, semoga penerbitan publikasi Produk Domestik Regional Bruto Riau menurut Pengeluaran 2008 - 2012 dapat bermanfaat bagi para pengguna data.

Pekanbaru, Juni 2013

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Kepala,

Drs. Mawardi Arsad, MSi
NIP : 19560727 197903 1 00

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar Kepala BPS Provinsi Riau	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel Analisis	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Tabel Lampiran	vii
Bab I Pendahuluan	2
1.1 Penjelasan Umum	2
1.2 Cara Penyajian dan Angka Indeks	3
Bab II Komponen-Komponen Pengeluaran	6
2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6
2.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	10
2.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	17
2.5 Perubahan Stok/Inventori	21
2.6 Ekspor dan Impor	23
Bab III Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran	27
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	27
3.2 Distribusi PDRB Pengeluaran	29
3.2.1 PDRB Pengeluaran Tanpa Migas	29
3.2.2 PDRB Pengeluaran Dengan Migas	33
3.3 Pertumbuhan PDRB Pengeluaran	35
3.3.1 PDRB Pengeluaran Tanpa Migas	35
3.3.2 PDRB Pengeluaran Dengan Migas	36
3.4 Keterkaitan PMTB Dengan PDRB dan Ekspor	37
Lampiran Tabel-Tabel Pokok	

DAFTAR TABEL ANALISIS

Tabel		Halaman
3.1.1	Perkembangan PDRB Riau Tanpa dan Dengan Migas menurut Pengeluaran, 2000 – 2012 (Miliar Rp.)	28
3.2.1	Distribusi PDRB Riau Tanpa Migas menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, 2008 – 2012 (%)	33
3.2.2	Distribusi PDRB Riau Dengan Migas menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku , 2008 – 2012 (%)	34
3.3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Riau menurut Pengeluaran, 2010 – 2012 (%)	37
3.4.1	Rasio PMTB/Ekspor dan ICOR Riau, 2008 – 2012	38

DAFTAR GRAFIK

Grafik		Halaman
3.1	Nilai PDRB Riau Tanpa dan Dengan Migas menurut Pengeluaran atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000, tahun 2012 (Miliar Rp.).....	29

<http://riau.bps.go.id>

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel		Halaman
1	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan '00 menurut Pengeluaran, 2008–2012 (Juta Rp.)	41
2	Distribusi Persentase PDRB Provinsi Riau Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan '00 menurut Pengeluaran, 2008–2012, (%).....	42
3	Indeks Perkembangan PDRB Provinsi Riau Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan '00 menurut Pengeluaran, 2008–2012, (%).....	43
4	Indeks Berantai PDRB Provinsi Riau Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan menurut Pengeluaran, 2008–2012, (%)	44
5	Indeks Implisit PDRB Provinsi Riau Tanpa Migas menurut Pengeluaran, 2008–2012	45
6	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan '00 menurut Pengeluaran, 2008–2012 (Juta Rp.)	46
7	Distribusi Persentase PDRB Provinsi Riau Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan '00 menurut Pengeluaran, 2008–2012, (%)	47
8	Indeks Perkembangan PDRB Provinsi Riau Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan '00 menurut Pengeluaran, 2008–2012, (%).....	48
9	Indeks Berantai PDRB Provinsi Riau Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan '00 menurut Pengeluaran, 2008–2012, (%)	49
10	Indeks Implisit PDRB Provinsi Riau Dengan Migas menurut Pengeluaran, 2008–2012	50



Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum

Tingkat kemampuan memproduksi barang dan jasa dari seluruh kegiatan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui pendekatan produksi (*production approach*). Dari angka PDRB ini dapat diketahui sampai pada tingkat (*level*) berapa suatu daerah dapat memproduksi barang dan jasa tersebut. Selanjutnya, perlu juga untuk mengetahui bagaimana pengeluaran atau permintaan masyarakat atau institusi lain dari hasil produksi yang diciptakan tersebut. Pemakaian penyediaan barang dan jasa (*supply*) ini bisa untuk keperluan konsumsi domestik seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi non finansial) atau untuk ekspor bila itu memungkinkan. Komposisi pemanfaatan barang dan jasa seperti disebutkan di atas dapat dilihat pada angka PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*).

PDRB menurut pendekatan pengeluaran atau sering disebut menurut

pengeluaran, secara teknis berarti pemanfaatan barang dan jasa untuk konsumsi akhir (*final demand*). PDRB menurut pengeluaran merupakan hasil penghitungan dari seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi oleh berbagai golongan masyarakat, meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), perubahan stok, ekspor, dan impor.

Dengan kata lain, penyajian PDRB menurut pengeluaran berarti melihat ekonomi dari sisi permintaan (*demand side*). Permintaan dapat dibedakan menurut permintaan dalam negeri dan luar negeri. Permintaan dalam negeri terdiri dari konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto. Sedangkan permintaan luar negeri merupakan ekspor barang dan jasa. Oleh karena sebagian permintaan barang dan jasa termasuk barang dan jasa yang berasal dari impor, sehingga untuk melihat permintaan PDRB, ekspor barang dan jasa dikurangi dengan impor

akan diperoleh ekspor neto. Selisih permintaan dan penyediaan, termasuk perbedaan statistik (*statistical discrepancy*), yang dicakup dalam perubahan stok.

1.2. Cara Penyajian dan Angka Indeks

Angka PDRB menurut pengeluaran disajikan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

- a. Pada penyajian atas dasar harga berlaku yang berarti semua komponen pengeluaran dihitung atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun.
- b. Pada penyajian atas dasar harga konstan tahun 2000, semua komponen penggunaan dihitung atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar 2000. Perubahan penghitungan ke tahun dasar baru, tahun 2000, yang dilakukan sejak tahun 2005 disebabkan antara lain karena adanya peningkatan daya beli masyarakat atas komoditas-komoditas terkini yang muncul akibat peningkatan teknologi atau memang benar-benar komoditas baru. Disamping itu, munculnya komoditas baru karena memang ditunjang oleh perubahan struktur pasokan (*supply*) dari produsen yang semakin bervariasi dalam menghasilkan produknya. Untuk menghitung perkembangan riil PDRB

menurut pengeluaran dari tahun ke tahun, digunakan harga konstan 2000 tersebut, melalui indeks berantailah laju pertumbuhan ekonomi setiap komponen dapat diikuti selama periode tertentu.

- c. PDRB menurut pengeluaran dapat juga disajikan dalam bentuk kontribusi atau peran masing-masing komponen terhadap total PDRB, yang menggambarkan struktur setiap komponen pengeluaran, sehingga mudah untuk mengetahui komposisi komponen pengeluaran, mulai dari kontribusi terbesar sampai terkecil. Ini dapat dicermati dari tabel distribusi persentase setiap komponen penggunaan.
- d. Selain itu, melalui angka indeks implisit dapat dilihat perkembangan harga yang terjadi di setiap komponen pengeluaran.
- e. Penjelasan tentang cara penghitungan distribusi atau kontribusi, indeks berantai dan indeks implisit adalah sebagai berikut :
 - (1) Kontribusi setiap komponen pengeluaran atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan diperoleh dari rasio setiap komponen terhadap total PDRB pengeluaran dikalikan 100 persen.

(2) Indeks berantai diperoleh dari rasio nilai setiap komponen terhadap nilai komponen yang sama pada tahun sebelumnya yang dikalikan 100. Untuk mendapatkan laju pertumbuhan setiap komponen pengeluaran, dengan cara mengurangnya dengan angka 100 dari setiap angka indeks berantai tersebut.

(3) Indeks implisit diperoleh dari rasio nilai masing-masing komponen atas dasar harga berlaku terhadap harga konstan per tahun dikalikan 100. Indeks ini dapat pula menggambarkan besaran tingkat harga secara lebih makro di setiap komponen.

<http://riau.bps.go.id>

2

Komponen -Komponen Pengeluaran

BAB II

KOMPONEN-KOMPONEN PENGELUARAN

Pada bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup dan definisi dari masing-masing komponen PDRB menurut pengeluaran, lalu dijelaskan juga tentang metode penghitungan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 serta sumber data yang digunakan.

2.1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA

2.1.1. Ruang Lingkup

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang dan jasa baik dengan cara membeli, menerima transfer, atau memproduksi sendiri dengan tujuan untuk dikonsumsi atau tidak diproses lebih lanjut menjadi produk baru, dikurangi hasil penjualan neto barang bekas atau apkiran pada periode waktu tertentu.

Dalam hal barang-barang yang mempunyai kegunaan ganda, maksudnya bisa untuk keperluan rumah tangga dan juga dapat digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan usaha rumah tangga, maka pembelian dan biaya-biayanya harus dialokasikan

secara proporsional terhadap masing-masing kegiatan yang dilakukan.

Konsumsi rumah tangga dikelompokkan menjadi:

- a. Kelompok makanan, minuman, baik dalam bentuk mentah maupun makanan jadi termasuk minuman beralkohol, tembakau, dan rokok.
- b. Kelompok bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan tutup kepala.
- c. Kelompok perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa rumah atau kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, dan air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi sewa rumah milik sendiri.
- d. Kelompok barang yang tahan lama dan perlengkapan rumah tangga.
- e. Kelompok perawatan dokter dan pengeluaran untuk obat-obatan.
- f. Kelompok transpor dan komunikasi.
- g. Kelompok pengeluaran atas peralatan untuk keperluan rekreasi, hiburan, dan jasa sosial lainnya.

- h. Kelompok macam-macam barang dan jasa.

2.1.2. Metode Penghitungan

Metode penghitungan yang biasa dipakai untuk memperkirakan besarnya pengeluaran rumah tangga adalah:

1. Metode langsung yang berdasarkan kepada hasil survei pengeluaran konsumsi rumah tangga seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Biaya Hidup (SBH), dan Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR).
2. Metoda tidak langsung melalui pendekatan arus barang, penilaian harga eceran, dan penjualan eceran kepada banyaknya barang dan jasa yang dikonsumsi untuk keperluan rumah tangga, tentunya, termasuk rumah tangga elit.
3. Metoda campuran, yaitu gabungan antara metoda langsung dengan metoda penilaian harga eceran atau dengan kata lain data konsumsi dari hasil survei dinilai dengan harga eceran yang dibayar konsumen.

Data konsumsi rumah tangga hasil Susenas masing-masing dinyatakan selama

periode satu minggu untuk kelompok makanan, sementara selama satu bulan untuk kelompok bukan makanan. Untuk keperluan estimasi selama satu tahun digunakan estimasi sebagai berikut:

$$C_{(n+1)} = C_n + [(b)(dp_{(n+1)})(C_n)] \dots\dots (1)$$

di mana :

$C_{(n+1)}$ = Rata-rata konsumsi (kuantum) per kapita sebulan pada tahun $(n + 1)$.

C_n = Rata-rata konsumsi (kuantum) per kapita sebulan tahun dasar (n) / data SUSENAS.

$dp_{(n+1)}$ = Perubahan pendapatan per kapita harga konstan tahun ke n dengan tahun ke $(n + 1)$.

b = Koefisien elastisitas.

Berdasarkan formulasi tersebut, konsumsi per kapita diasumsikan bergantung kepada besarnya koefisien elastisitas (b) , atau tingkat kecenderungan mengkonsumsi (MPC) suatu jenis komoditas apabila pendapatannya bertambah. Untuk mendapatkan nilai b ini, dipakai analisis regresi silang (*cross section regression analysis*), dengan cara pengeluaran konsumsi per kapita menurut kelompok pengeluaran diregresikan dengan pendapatan per kapita.

Model garis regresi yang dipakai untuk kelompok makanan pada umumnya berupa fungsi eksponensial, sedangkan untuk bukan makanan menggunakan fungsi linier.

Pada prakteknya ada komoditas yang tidak akan bertambah banyak dikonsumsi, bahkan mungkin berkurang walaupun pendapatan seseorang meningkat. Jenis komoditas ini disebut barang inferior untuk seseorang (misalnya; ketela pohon, jagung dan lain-lain). Jika pendapatan seseorang naik, maka dia cenderung menyubstitusikan komoditas tersebut dengan komoditas lainnya (seperti: terigu, roti, dan lain-lain sejenisnya). Sebaliknya, beberapa komoditas merupakan barang superior, seperti minuman botol, makanan dalam kaleng dan sebagainya. Pada umumnya komoditas ini akan semakin banyak dikonsumsi apabila pendapatan seseorang bertambah.

a. Kelompok Makanan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk mendapatkan besaran koefisien elastisitas (b) digunakan bentuk persamaan/fungsi eksponensial sebagai berikut :

$$Q_i = aY_i^b \dots\dots\dots (2)$$

di mana:

Q_i = Rata-rata konsumsi per kapita sebulan (kuantum).

Y_i = Pendapatan per kapita sebulan (rupiah)

a = Konstanta

b = Koefisien elastisitas

Untuk menyederhanakan penghitungan persamaan eksponensial tersebut dibuat dalam bentuk linear dengan melogaritmakan :

$$\ln Q_i = \ln (aY_i^b) \dots\dots\dots (3)$$

atau,

$$\ln Q_i = \ln a + b \ln Y_i \dots\dots\dots (4)$$

Sebelum digunakan untuk mengestimasi, nilai koefisien b ini terlebih dahulu diuji untuk meyakinkan apakah ia menunjukkan signifikansi secara statistik. Apabila nilai koefisien b *significant* dan mempunyai nilai koefisien korelasi (r) yang tinggi (mendekati angka 1), maka persamaan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan konsumsi jenis barang dimaksud.

Setelah nilai koefisien b diperoleh dan nilai keabsahannya dapat diterima, konsumsi pada tahun-tahun lainnya, yang tidak ada surveinya, dapat diperoleh dengan menggunakan formulasi seperti pada Persamaan (1).

Selanjutnya nilai konsumsi kelompok makanan atas dasar harga yang berlaku diperoleh dengan mengalikan kuantitas barang tersebut dengan harga rata-rata setiap jenisnya pada masing-masing tahun yang bersangkutan. Hasilnya dikali 12, untuk mendapatkan angka per tahun, dan dikali lagi dengan penduduk pertengahan tahun untuk mendapatkan total konsumsi penduduk untuk bagian tersebut. Sedangkan nilai konsumsi atas dasar harga konstan tahun 2000, dilakukan dengan cara revaluasi, yaitu kuantum per jenis komoditas barang pada masing-masing tahun yang bersangkutan dikalikan dengan harga konstan tahun 2000, dikali 12, dan selanjutnya dikali lagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

b. Kelompok Bukan Makanan

Untuk menghitung pengeluaran konsumsi rumah tangga kelompok bukan makanan digunakan persamaan/fungsi linier. Untuk mengestimasi konsumsi barang dan jasa dalam kelompok bukan makanan, pendapatan (satuan rupiah) dihubungkan dengan pengeluaran setiap jenis bukan makanan dalam satuan rupiah. Fungsi linier tersebut adalah:

$$Q_i = a + bY_i \dots\dots\dots (5)$$

di mana :

Q_i = Rata-rata konsumsi per kapita sebulan (rupiah)

a = Konstanta

b = Koefisien elastisitas

Y_i = Pendapatan per kapita sebulan (rupiah)

Untuk memperkirakan nilai pengeluaran setiap jenis kelompok bukan makanan pada tahun yang tidak mempunyai survei, digunakan formulasi Persamaan (1). Perubahan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan ($dp_{(n+1)}$) dihitung dengan menggunakan harga konstan 2000, yaitu mendeflasinya dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sesuai dengan jenis barang yang dikonsumsi. Aplikasi formulasi Persamaan (1) menghasilkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan atas dasar harga konstan tahun 2000. Untuk mendapatkan nilai konsumsi bukan makanan atas dasar harga berlaku, rata-rata pengeluaran atas dasar harga konstan tersebut di atas pada masing-masing tahun dikalikan dengan IHK sesuai dengan jenis kelompok/subkelompok masing-masing dikali 12, selanjutnya dikali lagi dengan penduduk pertengahan tahun.

2.1.3. SUMBER DATA

Data perkiraan konsumsi rumah tangga bersumber dari hasil Susenas modul konsumsi, yaitu rata-rata kuantum konsumsi per kapita seminggu untuk kelompok makanan dan rata-rata rupiah konsumsi per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan. Di samping itu, digunakan juga data lainnya seperti pendapatan per kapita atas dasar harga konstan yang bersumber dari PDRB sektoral (lapangan usaha). Rata-rata harga eceran dan IHK bersumber dari Statistik Harga Konsumen di perkotaan dan perdesaan. Jumlah penduduk pertengahan tahun bersumber dari publikasi Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dan dari data proyeksi penduduk.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA

Lembaga non profit yang melayani rumah tangga merupakan satu entitas legal, yang secara prinsip terlibat dalam kegiatan layanan atau pemberian jasa kepada rumah tangga (*non-market*). Seluruh biaya kegiatan lembaga bersumber dari sumbangan atau donasi rumah tangga. Oleh karena itu hampir seluruh aktivitas lembaga dirancang

dan dikontrol oleh rumah tangga. Umumnya pekerja yang aktif dalam kegiatan lembaga merupakan tenaga kerja tidak dibayar (*volunteer*).

Ada 5 (lima) karakteristik yang menjadi ciri dari kegiatan Lembaga Non Profit yaitu:

- a. Pada umumnya merupakan lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat.
- b. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang mempunyai hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan penting yang diambil lembaga.
- c. Setiap anggota lembaga mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus. *Profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga.
- d. Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus.
- e. Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan

surplus usaha melalui kegiatan produktifnya, namun surplus usaha yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada kegiatan sejenis.

2.2.1. Ruang Lingkup

Pengeluaran konsumsi lembaga non *profit* meliputi semua pengeluaran atas pembelian atau penerimaan transfer, baik yang berbentuk barang maupun jasa, seperti pembayaran upah dan gaji, penyusutan dan pajak tak langsung neto, dikurangi dengan penjualan barang dan jasa yang dihasilkan. Lingkup Lembaga Non Profit yang menjadi fokus pembahasan disini adalah Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bentuk organisasi yaitu : Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Sosial (Orsos), Organisasi Profesi (Orprof), Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga/Hobi/, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Keagamaan, Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa.

2.2.2. Metode Perhitungan

Dengan asumsi tidak ada kegiatan ekonomis produktif yang dilakukan lembaga, maka nilai pengeluaran konsumsi LNPRT sama dengan output atau biaya

produksi yang dikeluarkan lembaga dalam rangka melakukan kegiatan layanan kepada masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi (antara) ditambah biaya primer (upah dan gaji, penyusutan barang modal dan pajak tak langsung).

Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan lembaga atas pengeluaran barang/jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian pihak lain (transfer). Jika lembaga menggunakan input yang diperoleh secara cuma-cuma dari pihak lain, maka nilainya diperkirakan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Perkiraan nilai pengeluaran konsumsi LNPRT dapat dilakukan dengan menggunakan metoda langsung dan metoda tidak langsung.

a. Metode Langsung

Dengan metoda ini data diperoleh dengan pencacahan langsung ke LNPRT secara sampel. Nilai yang dimaksud merupakan hasil estimasi rata-rata biaya layanan dari sampel sebagai berikut :

$$\bar{x}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}}{n_i} \dots\dots\dots (6)$$

dimana :

- x_{ij} = nilai biaya layanan untuk lembaga ke-j dari bentuk LNPRT kode-i
- \bar{x}_i = rata-rata biaya layanan LNPRT kode-i
- n_i = banyaknya sampel LNPRT

Selanjutnya rata-rata biaya layanan LNPRT per bentuk lembaga dikalikan dengan populasi bentuk LNPRT per bentuk lembaga, maka diperoleh estimasi nilai pengeluaran konsumsi bentuk LNPRT per bentuk lembaga. Nilai estimasi pengeluaran konsumsi LNPRT merupakan penjumlahan nilai pengeluaran konsumsi seluruh bentuk LNPRT.

Sedangkan perhitungan layanan LNPRT atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan bobot IHK untuk masing-masing rincian pengeluaran per bentuk lembaga.

$$m_k = \frac{x_k}{a_k} \dots\dots\dots (7)$$

dimana :

- m_k = biaya layanan rincian pengeluaran ke- k (adh konstan)
- x_k = biaya layanan rincian pengeluaran ke-k (adh berlaku)
- k = rincian pengeluaran = 1,2,...,n

a_k = IHK untuk rincian pengeluaran ke-k.

Kemudian estimasi atas dasar harga konstan per bentuk lembaga diakumulasi dengan estimasi atas dasar konstan seluruh lembaga, sehingga didapat estimasi atas dasar harga konstan LNPRT.

b. Metoda Tidak Langsung

Metode ini memperkenalkan cara menghitung estimasi pendapatan LNPRT (sebagai pembiayaan) berdasarkan pengeluaran dari lembaga lain yang membiayai kegiatan LNPRT. Caranya dengan menghitung besaran pengeluaran unit atau lembaga lain yang menjadi penyumbang (donatur) kegiatan LNPRT tersebut.

Untuk mengukur pertumbuhan riil pengeluaran konsumsi LNPRT dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan berikut :

- i. Metode deflasi yaitu dengan membagi estimasi pengeluaran konsumsi LNPRT adh berlaku dengan IHK yang sesuai
- ii. Metode rasio pengali tetap atau menaksir penerimaan LNPRT berdasarkan pengeluaran RT, yaitu dengan mengalikan rasio (tetap = proporsi tahun dasar) terhadap nilai pengeluaran konsumsi RT adh konstan.

$$Y_{LNPRT} = (r\%)(C_{RT}) \dots\dots\dots (8)$$

dimana :

Y_{LNPRT} = pendapatan LNPRT

$r\%$ = proporsi pengeluaran rumah tangga untuk LNPRT

C_{RT} = pengeluaran total konsumsi rumah tangga

Dengan asumsi pendapatan LNPRT sama dengan konsumsi LNPRT, maka :

$$Y_{LNPRT} = (C_{LNPRT}) \dots\dots\dots (9)$$

2.2.3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk menghitung pengeluaran konsumsi LNPRT diperoleh dari hasil survei khusus. Data tersebut dalam bentuk nilai pengeluaran atas barang dan jasa oleh lembaga serta barang dan jasa dari transfer pihak lain, yang digunakan dalam rangka menghasilkan jasa layanan.

Data pendukung yang dibutuhkan adalah IHK per kelompok pengeluaran. Data ini digunakan untuk menghitung pengeluaran konsumsi LNPRT adh konstan.

Untuk melakukan estimasi pengeluaran konsumsi LNPRT masih diperlukan data lain, yaitu jumlah populasi LNPRT masing-masing bentuk lembaga. Data ini diperoleh dari hasil kegiatan

”listing” ke instansi atau lembaga pembina dari unit LNPRT yang bersangkutan, maupun dengan pengecekan langsung ke lapangan.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH

2.3.1. Ruang Lingkup

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa termasuk bantuan sosial (biaya antara), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi pemerintah). Konsumsi pemerintah disebut juga dengan output non pasar pemerintah. Kegiatan yang tidak dapat dipisahkan tersebut adalah :

1. Kegiatan di instansi pemerintah yang memproduksi barang sejenis dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan induknya. Penjualan barang-barang ini bersifat insidental dari tugas pokok dan fungsi lembaga/departemen

tersebut dan hasil penjualannya disebut pendapatan dari barang yang dihasilkan.

2. Kegiatan yang bersifat jasa seperti kegiatan rumah sakit, sekolah, universitas, pemerintahan, museum, perpustakaan, tempat-tempat rekreasi dan tempat-tempat penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai dari keuangan pemerintah, yang keluarannya dijual dengan harga yang pada umumnya tidak mencapai/sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima pemerintah dari hasil kegiatan seperti ini disebut pendapatan dari jasa yang diberikan.

Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan agregasi dari pengeluaran konsumsi pemerintah yang mencakup pengeluaran konsumsi semua unit pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota dan pengeluaran konsumsi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Komponen ini meliputi seluruh pengeluaran pemerintah di dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut terdiri dari:

- a. Pembayaran upah dan gaji sebagai balas jasa tenaga kerja yang biasanya disebut dengan belanja pegawai.
- b. Pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakai/dikonsumsi termasuk bantuan sosial disebut dengan biaya antara.
- c. Imputasi nilai penyusutan barang-barang modal pemerintah.

Total pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan penjumlahan dari masing-masing jenis pengeluaran tersebut di atas dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa. Penjualan barang dan jasa meliputi penerimaan barang dan jasa yang dijual pemerintah kepada masyarakat yang pada prinsipnya tidak mengambil untung. Data yang tersedia di sini tidak bisa dipisahkan sebagai unit yang berdiri sendiri.

2.3.2. Metode Penghitungan

1. Neraca Produksi Pemerintah

Untuk menghitung pengeluaran konsumsi pemerintah, terlebih dahulu harus disusun neraca produksi pemerintah, dimana konsumsi pemerintah merupakan salah satu komponennya. Neraca produksi pemerintah terdiri dari pengeluaran untuk biaya antara (belanja barang dan bantuan sosial), balas

jasa pegawai/belanja pegawai dan penyusutan di sisi kiri, serta konsumsi pemerintah (output non pasar) dan penjualan barang dan jasa (output pasar) di sisi kanan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Neraca Produksi Pemerintah

Input	Output
1. Biaya antara (belanja barang dan bantuan sosial) (A)	3. Output (C)
2. Nilai tambah bruto (B)=(B1)+(B2)	3.1. Pengeluaran konsumsi pemerintah (output non pasar) (D)=(C)-(E)
2.1. Penyusutan (B1)	3.2. Penjualan barang dan jasa (E)
2.2. Belanja pegawai (B2)	
Total Input (A)+(B)	Total Output (C)

disuplai secara gratis, atau atas dasar harga yang secara ekonomi tidak berarti, kepada institusi lain atau masyarakat.

b. **Biaya antara** adalah pemakaian barang yang tidak tahan lama serta jasa dan bantuan sosial yang digunakan sebagai input dalam menghasilkan output

a. **Output pemerintah** terdiri dari output pasar dan output non pasar. **Output non pasar** adalah output yang dihasilkan oleh pemerintah yang dipergunakan sendiri oleh pemerintah atau disebut juga dengan konsumsi pemerintah, yaitu barang dan jasa yang digunakan sendiri sebagai konsumsi akhir oleh pemerintah. Sedangkan output pasar pemerintah merupakan penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah yang

pemerintah.

c. **Nilai tambah bruto pemerintah** merupakan penjumlahan dari balas jasa pegawai (belanja pegawai) dan penyusutan. Balas jasa pegawai merupakan pembayaran yang diterima pegawai secara langsung sehubungan dengan pekerjaannya, baik dalam bentuk uang maupun barang. Sedangkan penyusutan merupakan nilai yang disisihkan sebagai pengganti susut atau

ausnya barang modal pemerintah karena dipakai dalam proses produksi.

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga (adh) Berlaku

Nilai konsumsi pemerintah sama dengan total output dikurangi nilai barang dan jasa yang dijual. Sedangkan total input merupakan penjumlahan dari biaya antara dan nilai tambah bruto, jadi nilai pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan pengurangan total input dengan penjualan barang dan jasa pemerintah.

Untuk pemerintah pusat, data biaya antara dan belanja pegawai didapat dari rincian pengeluaran APBN, sedangkan penjualan barang dan jasa diperoleh dari rincian penerimaan APBN, khususnya pada bagian penerimaan bukan pajak lainnya, yaitu penjualan barang dan jasa dari semua unit pemerintah pusat. Penyusutan diestimasi dengan menggunakan persentase tertentu terhadap belanja modal.

Untuk pemerintah daerah, data biaya antara dan belanja pegawai didapat dari rincian pada sisi pengeluaran APBD (Propinsi, Kabupaten/Kota) dan desa. Penyusutan diestimasi dengan menggunakan persentase tertentu terhadap belanja modal. Nilai penjualan barang dan jasa didapat dari rincian pada sisi

penerimaan APBD pada bagian penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), yaitu rincian penerimaan lain-lain. Nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan adalah jumlah penjualan barang dan jasa pada setiap tingkat pemerintahan yaitu Propinsi, Kabupaten/Kota dan desa (untuk pemerintah desa data tidak tersedia).

Biaya antara, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah daerah Propinsi mencakup biaya antara, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah Propinsi, ditambah dengan biaya antara, belanja pegawai dan nilai penjualan barang dan jasa pemerintah pusat yang menjadi bagian dari biaya antara, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah daerah Propinsi.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga (adh) Konstan

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adh konstan merupakan hasil penghitungan komponen-komponen neraca produksi adh konstan. Biaya antara adh konstan didapat dengan *men-deflate* biaya antara atas dasar harga berlaku dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) tanpa sektor ekspor. Sedangkan nilai tambah bruto atas

dasar harga konstan didapat dengan mengekstrapolasi nilai tambah bruto pada tahun dasar dengan indeks jumlah pegawai negeri sipil. Untuk penjualan barang dan jasa atas dasar harga konstan didapat dengan mempergunakan persentase penjualan barang dan jasa terhadap output pada harga berlaku.

2.3.3. Sumber Data

Data yang dipergunakan diperoleh dari:

1. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (K1, K2 dan K3) dari Badan Pusat Statistik.
2. Realisasi APBD dari Biro Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Jumlah pegawai negeri sipil dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

2.4.1. Ruang Lingkup

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru dari dalam negeri/wilayah dan barang modal baru atau bekas dari luar negeri/wilayah, yang dikurangi penjualan neto barang modal bekas digunakan untuk berproduksi di dalam

negeri/ wilayah tersebut. Barang modal juga dapat diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi secara berulang-ulang dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

PMTB yang terdiri dari berbagai jenis dan wujud (kapital) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) klasifikasi pokok yaitu menurut jenis barang, menurut sektor penguasa/pemilik dan menurut institusi.

1. PMTB menurut jenis barang terdiri dari :
 - i. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) tetap baik baru maupun bekas yang dirinci menurut jenis aset seperti : bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan peralatannya, kendaraan dan ternak
 - ii. Perbaikan besar aset berwujud
 - iii. Biaya transfer kepemilikan aset.

2. PMTB menurut Sektor/Lapangan Usaha

Yang dimaksud adalah barang modal yang dimiliki atau dikuasai oleh sektor ekonomi produksi (produsen) yang digunakan dalam proses produksinya. Sektor ekonomi yang secara garis besar terdiri dari sektor primer, sekunder dan tertier ini secara rinci terdiri dari :

Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas & Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Bank dan Lembaga Keuangan; Pemerintah Umum dan Jasa-jasa.

Rincian PMTB setiap lapangan usaha adalah sebagai berikut :

- i. Sektor pertanian mencakup semua bangunan bukan tempat tinggal yang digunakan oleh para petani untuk menyimpan hasil produksi, bangunan dan saluran air untuk irigasi, peningkatan mutu tanah, penanaman dan perluasan perkebunan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian serta perbaikan besar-besaran atas mesin tersebut, dan pembelian ternak perah dan ternak yang dipelihara untuk diambil susu atau telurnya serta alat-alat penangkapan ikan dan tempat pemeliharaannya.
- ii. Sektor pertambangan terdiri dari perluasan areal pertambangan dan bangunannya, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan pertambangan serta perbaikannya, kendaraan/alat pengangkutan yang dipakai dalam usaha pertambangan dan barang-barang modal lainnya yang digunakan sebagai alat

dalam memproduksi di sektor pertambangan.

- iii. Sektor industri pengolahan adalah semua barang-barang modal seperti gedung-gedung, kendaraan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang dipakai dalam usaha industri pengolahan termasuk perbaikannya.
- iv. Sektor listrik, gas dan air bersih mencakup pembuatan proyek pembangkit tenaga listrik, transmisi dan gardu distribusi beserta kantor-kantornya, dan pembelian/penambahan prasarana produksi di sektor gas dan air minum.
- v. Sektor bangunan adalah semua pembelian/penambahan prasarana produksi yang diperlukan dalam kegiatan konstruksi, termasuk kantor beserta peralatannya, alat-alat besar dan kendaraan yang digunakan dalam menunjang kegiatan sektor konstruksi.
- vi. Sektor transportasi dan komunikasi yang menjadi PMTB adalah semua kendaraan yang dioperasikan antara lain : bus, truk, sado, beca dan lain-lain, alat angkutan di sungai, laut dan udara, kereta api termasuk kantor perusahaan jawatan kereta api, pembuatan jalan kereta api, stasiun dengan rambu-

rambunya, bangunan bukan tempat tinggal dan kendaraan yang digunakan untuk menunjang usaha angkutan.

- vii. Sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, real estate dan jasa perusahaan mencakup bangunan bukan tempat tinggal yang dimiliki dan digunakan untuk operasi perbankan, kendaraan yang dimiliki dan dipakai untuk menunjang kegiatan perbankan, kantor-kantor perwakilan perbankan serta peralatan yang digunakan.
- viii. Sektor pemerintahan, barang modal yang dimaksud adalah gedung kantor pemerintahan, pembelian mobil pemadam kebakaran beserta peralatannya, semua alat yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk juga pembuatan jalan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sedangkan pembelian barang modal oleh pemerintah untuk perusahaan negara dalam rangka bantuan pemerintah tidak termasuk dalam pembentukan modal sektor pemerintahan melainkan masuk pada pembentukan modal oleh perusahaan penerima sumbangan.
- ix. Sektor jasa-jasa berupa gedung bioskop, ternak sirkus atau taman hiburan,

peralatan kantor, kendaraan dan sebagainya.

2.4.2. Metode Penghitungan

Estimasi penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu secara langsung dan secara tidak langsung.

a. Pendekatan Secara Langsung

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi pada setiap sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha). Penilaian PMTB adalah atas dasar harga berlaku, yaitu harga barang modal ditambah dengan biaya-biaya lain yang dikeluarkan, seperti biaya transport, biaya instalasi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pengadaan barang modal tersebut, termasuk pula biaya bea masuk dan pajak tak langsung.

b. Pendekatan Secara Tidak langsung

Pendekatan secara tidak langsung disebut juga metode arus komoditas (*commodity flow*) atau pendekatan dari sisi penyediaan barang modal.

Pendekatan dengan cara ini membutuhkan ketersediaan data dari sisi penyediaan barang modal (*supply side*), baik dari produksi domestik maupun dari wilayah lain.

Estimasi nilai PMTB dalam bentuk bangunan dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu terhadap output sektor konstruksi, baik untuk perhitungan atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

Estimasi berupa mesin, angkutan dan barang modal lainnya dibedakan menurut barang modal yang berasal dari produksi dalam negeri dan yang berasal dari impor. Penghitungan berupa mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya yang berasal dari dalam negeri diperoleh dengan 2 (dua) cara, yaitu yang pertama mengalokasikan output mesin, angkutan dan barang modal lainnya yang menjadi bagian dari pembentukan modal ditambah biaya angkut dan margin perdagangan, dengan perhitungan tersebut diperoleh estimasi PMTB atas dasar harga berlaku.

Untuk mendapatkan harga konstan, PMTB mesin-mesin, alat angkut dan barang modal lainnya atas dasar harga berlaku di-deflate dengan IHPB masing-masing jenis barang yang sesuai. Jika data IHPB tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode ekstrapolasi yaitu dengan mengalikan nilai barang modal pada seri konstan dengan indeks volume masing-masing jenis barang modal. Untuk memperoleh nilai berlakunya, nilai PMTB harga konstan di-inflate dengan

indeks harga masing-masing jenis barang modal.

Estimasi PMTB berupa mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya yang berasal dari impor dapat dilakukan dengan 2 (dua) tahapan, *pertama* dari PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh nilai total barang impor, kemudian untuk merinci menjadi mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya, digunakan alokator barang modal impor dengan kode SITC 3 digit. *Kedua* untuk memperoleh PMTB atas dasar harga konstan, PMTB adh berlaku di-deflate dengan menggunakan indeks harga yang sesuai sebagai deflatornya.

2.4.3. Sumber Data

Data yang dibutuhkan untuk melakukan estimasi PMTB adalah :

- i. Output bangunan
- ii. Nilai barang modal impor
- iii. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan (pendekatan langsung)
- iv. Survei industri besar sedang
- v. Publikasi Statistik Energi untuk sektor listrik, gas dan air bersih.
- vi. Survei Konstruksi
- vii. Hasil survei perusahaan-perusahaan angkutan dan dinas-dinas terkait

- viii. Publikasi PT Kereta Api
- ix. Publikasi PT Pos dan PT Telekomunikasi untuk sektor komunikasi.

2.5. PERUBAHAN STOK/INVENTORI

Komponen perubahan inventori sama pengertiannya dengan perubahan stok yang digunakan sebagai komponen penyeimbang/sisa pada PDRB menurut pengeluaran. Inventori merupakan persediaan barang jadi maupun setengah jadi pada unit institusi yang tidak terpakai pada proses produksi atau belum selesai diproses atau belum terjual, sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode pencatatan dengan nilai inventori pada awal periode pencatatan. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bisa bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

2.5.1. Ruang Lingkup

Inventori merupakan persediaan barang setengah jadi maupun barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi produksi maupun konsumsi. Barang inventori akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi baik sebagai input antara maupun input akhir.

Klasifikasi inventori menurut jenis barang dapat dibedakan atas :

- i. Barang inventori menurut sektor penghasilnya seperti produk atau hasil dari : perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, dan konstruksi
- ii. Berbagai jenis bahan baku dan penolong, yaitu semua bahan, komponen atau persediaan yang diperoleh untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
- iii. Barang jadi, yaitu barang yang telah selesai diproses tapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.
- iv. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- v. Ternak untuk tujuan dipotong
- vi. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual.
- vii. Pengadaan barang-barang oleh unit perdagangan untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan

viii. Stok pada pemerintah yang mencakup barang-barang strategis, seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2.5.2. Metode Penghitungan

Pada teori seri penghitungan sebelumnya, perubahan inventori dihitung dengan cara residual atau selisih dari perbedaan antara total PDRB Sektoral dengan total PDRB Pengeluaran. Dengan demikian pada komponen ini mencakup perubahan stok/inventori dan diskrepansi statistik. Komponen perubahan inventori satu-satunya komponen pengeluaran yang dapat bernilai positif atau negatif. Positif dalam arti terjadi penambahan barang inventori sedangkan negatif apabila terjadi pengurangan barang inventori dari persediaan yang ada.

Untuk menghitung komponen perubahan inventori, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

a. Pendekatan Langsung

Nilai inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dari laporan neraca akhir tahun perusahaan dengan series data yang berurutan. Perubahan inventori merupakan selisih antara nilai posisi inventori pada akhir tahun

dikurangi dengan nilai posisi pada awal tahun pada waktu yang sama. Nilai posisi inventori pada akhir satu tahun selalu merupakan nilai posisi inventori awal pada tahun berikutnya.

b. Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung atau disebut juga pendekatan komoditi, dalam prakteknya lebih mudah untuk dilakukan. Data yang dibutuhkan adalah data tentang volume dan harga dari masing-masing barang inventori. Nilai inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal barang inventori dikalikan dengan rata-rata harga pembelian, atau rata-rata harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia.

Pertumbuhan riil perubahan inventori dihitung dengan men-*deflate* nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan indeks yang sesuai, bisa menggunakan IHPB yang mewakili indeks implisit PDRB.

Karena keterbatasan data, PDRB Pengeluaran Riau masih menggunakan metode lama, yaitu perubahan stok yang merupakan residual dari total PDRB Sektoral dengan total komponen PDRB Pengeluaran.

2.5.3. Sumber Data

Sumber data perubahan inventori :

- i. Data komoditi pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian
- ii. Data komoditas perkebunan
- iii. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait
- iv. Indeks harga implisit PDRB sektoral terpilih
- v. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.

2.6. EKSPOR DAN IMPOR

2.6.1. Ruang Lingkup

1. Ekspor dan Impor Antar Negara

Transaksi perdagangan antar negara dicirikan melalui 2 (dua) aktifitas yang berlawanan, disebut ekspor apabila produk barang dan jasa dikirim ke luar negeri dan impor apabila produk tersebut masuk ke dalam wilayah ekonomi (domestik).

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi ekonomi penjualan, pertukaran (*barter*), hadiah (*gifts*) atau hibah (*grants*) yang dilakukan oleh penduduk residen suatu negara/wilayah (*region*) dengan non-residen

atau pihak luar negeri atau wilayah (*region*) lain. Sedangkan impor merupakan transaksi ekonomi berupa pembelian, pertukaran (*barter*), penerimaan hadiah (*gifts*), hibah (*grants*), berbagai jenis barang dan jasa oleh residen dari non-residen. Konsep residen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor suatu negara meliputi transaksi ekonomi yang dilakukan antara unit-unit ekonomi negara lain.

2. Ekspor dan Impor Antar Daerah

Panduan resmi tentang pencatatan kegiatan antar daerah di dalam wilayah domestik suatu negara, sehingga pada prakteknya setiap negara mempunyai pendekatan sendiri yang berbeda-beda dalam upaya mengukur jenis transaksi perdagangan yang mendominasi peta ekonomi di setiap daerah di dalam negaranya. Lemahnya sistem administrasi pemerintahan dalam menyusun jenis statistik ini berdampak terhadap kualitas pengumpulan data transaksi yang sangat berarti dalam konteks mikro atau semi mikro ini.

Pada penyusunan statistik PDRB, kegiatan ini disebut dengan transaksi eksternal antar wilayah yang artinya adalah sistem perdagangan barang dan jasa antar suatu wilayah dengan wilayah-wilayah domestik lainnya (tidak termasuk transaksi

dengan luar negeri). Hampir seluruh wilayah di Indonesia mempunyai ketergantungan yang sangat kuat dengan wilayah-wilayah lainnya. Perbedaan struktur dan aktivitas ekonomi menyebabkan lalulintas perdagangan barang dan jasa menjadi subur dan menjadi kian dominan.

2.6.2. Metode Penghitungan

1. Ekspor dan Impor Antar Negara

Nilai ekspor dan impor berbagai produk barang dan jasa keluar maupun masuk suatu negara (wilayah) adalah jumlah hasil kali antara volume atau kuantum setiap barang dan jasa dengan masing-masing harganya (atas dasar harga berlaku). Harga ekspor barang dinyatakan dalam harga *free on board (fob)*, sedangkan impor barang dinyatakan dalam harga *cost, insurance and freight (cif)*.

Nilai ekspor dan impor dalam standar baku adalah dalam satuan dolar AS, untuk itu perlu dilakukan penyetaraan ke dalam satuan rupiah. Untuk itu diperlukan nilai kurs atau nilai penyetaraan. Kurs nilai dolar AS terhadap rupiah dibedakan untuk ekspor dan impor. Untuk ekspor digunakan rata-rata kurs beli dolar AS dari Bank Indonesia yang sudah ditimbang dengan nilai nominal transaksi ekspor bulanan. Sedangkan impor

digunakan rata-rata kurs jual dolar AS dari Bank Indonesia yang ditimbang dengan nilai nominal transaksi impor bulanan.

Untuk mendapatkan harga konstan, nilai ekspor dan impor atas dasar harga berlaku di-*deflate* dengan menggunakan indeks harga per unit (IHPU). Indeks IHPU adalah suatu indeks yang sudah mempertimbangkan pengaruh nilai kurs untuk menyajikan nilai ekspor dan impor atas dasar harga konstan dalam rupiah. Sedangkan untuk ekspor impor antar daerah dapat juga digunakan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Ekspor dan Impor Antar Daerah

a. Metode Langsung

Yaitu dengan melakukan survei khusus arus barang maupun jasa yang keluar masuk ke dalam suatu daerah. Survei dirancang sesuai dengan jenis barang, asal barang dan tujuan pengeluarannya di daerah tersebut.

b. Metode Tidak Langsung

Dengan menggunakan data sekunder dari Direktorat Perdagangan dan Jasa BPS untuk produk barang, sedangkan untuk

produk jasa menggunakan data sekunder dari Bank Indonesia.

2.6.3. Sumber Data

1. Ekspor dan Impor Antar Negara

- a. Publikasi Statistik Ekspor dan Impor Barang, BPS
- b. Neraca Pembayaran BI dan IMF

2. Ekspor dan Impor Antar Daerah

Data sekunder dari pencatatan

administrator pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan udara maupun terminal, selain itu jembatan timbang juga bisa menjadi alternatif.

Survei-survei khusus baik yang bersifat pengumpulan data primer maupun data sekunder merupakan pilihan yang relatif lebih baik meskipun implikasinya cukup besar, baik yang berkaitan dengan penyediaan dana, waktu, sumber daya manusia maupun pemilihan responden.

<http://riau.bps.go.id>

3

Perkembangan PDRB
Menurut Pengeluaran

BAB III

PERKEMBANGAN PDRB MENURUT PENGELUARAN

Bab ini menganalisis secara deskriptif tentang PDRB Riau yang ditinjau dari sisi pengeluaran atau permintaan (*demand side*). Analisis yang dimaksud adalah analisis perkembangan setiap komponen pengeluaran, struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan analisis lain seperti : ICOR dan rasio PMTB terhadap ekspor. Analisis dibedakan ke dalam kelompok PDRB pengeluaran tanpa migas dan termasuk migas.

3.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran

Untuk mengamati perkembangan perekonomian suatu daerah, selain melalui perkembangan total PDRB juga dapat diamati dari perkembangan masing-masing komponen pengeluaran selama periode tertentu. Dari sini, akan diketahui sampai pada tingkat (*level*) berapa komponen pengeluaran tersebut telah dicapai.

Dari Tabel 3.1.1 dapat diamati bahwa secara total PDRB tanpa migas telah terjadi perkembangan yang signifikan, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2000. Untuk harga berlaku, dari sebesar 22,46 triliun rupiah di tahun 2000, naik

13,20 kali menjadi sebesar 296,43 triliun rupiah pada tahun 2012. Sementara secara riil, atas dasar harga konstan 2000, juga meningkat sebesar 2,52 kali dari 22,46 triliun di tahun 2000 menjadi sebesar 56,52 triliun rupiah pada tahun 2012.

Selanjutnya, bila diamati pada setiap komponen pengeluaran tanpa migas atas dasar harga berlaku maka perkembangan tertinggi terjadi pada komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 15,90 kali dari 3,85 triliun rupiah di tahun 2000 menjadi 61,23 triliun rupiah pada tahun 2012. Komponen pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 13,23 kali, sedangkan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang meningkat 12,56 kali dari 2,21 triliun rupiah di tahun 2000 menjadi 27,76 triliun rupiah pada tahun 2012. Komponen ekspor sebesar 7,88 kali, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 7,64 kali, dan impor sebesar 4,96 kali.

Sedangkan ditinjau dari PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan 2000, urutan perkembangan per komponen pengeluaran dari tahun 2000 ke 2012 adalah pembentukan modal tetap bruto sebesar 4,39

kali, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 2,90 kali, impor sebesar 2,89 kali, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 2,63 kali, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 2,17 kali dan ekspor sebesar 1,75 kali.

Dengan memasukkan unsur migas ke dalam perhitungan PDRB Riau, secara total PDRB atas dasar harga berlaku telah terjadi kenaikan sebesar 6,74 kali di tahun 2012 dibanding tahun 2000, sementara PDRB atas dasar harga konstan 2000 mengalami peningkatan hanya sebesar 1,53 kali pada tahun 2012. Lebih jauh lagi, perkembangan beberapa komponen yang terkait dengan unsur migas PDRB pengeluaran seperti pembentukan modal

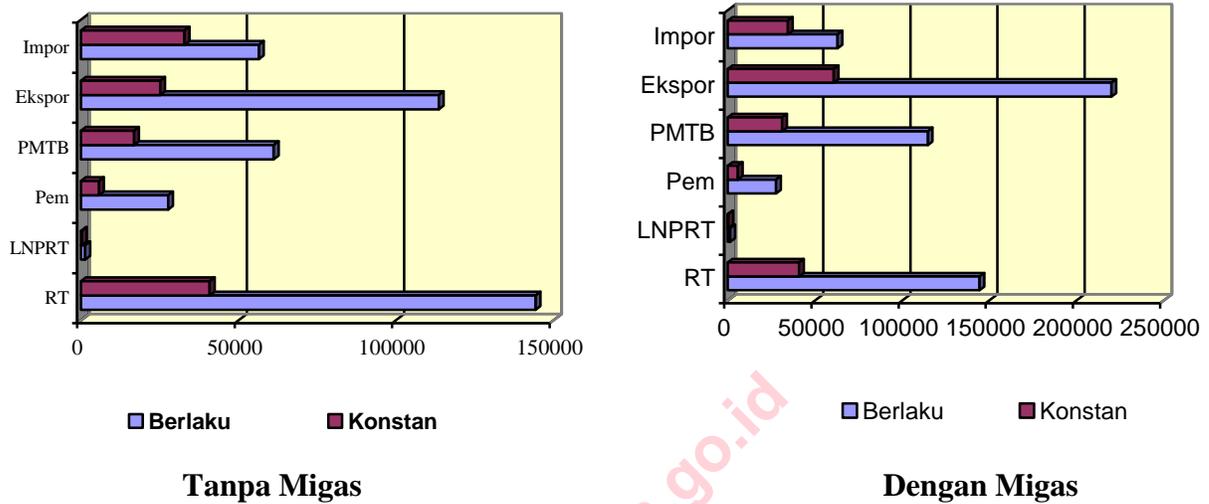
tetap bruto, ekspor dan impor, selama periode 2000-2012 juga mengalami perkembangan yang cukup tinggi. Untuk komponen pembentukan modal tetap bruto atas dasar harga berlaku telah terjadi kenaikan sebesar 9,16 kali di tahun 2012, sementara atas dasar harga konstan 2000 hanya naik sebesar 2,49 kali pada tahun yang sama. Selanjutnya pada tahun yang sama, komponen ekspor atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 5,53 kali, sementara atas dasar harga konstan 2000 meningkat sebesar 1,53 kali. Sedangkan pada komponen impor, atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 5,36 kali, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 sebesar 2,94 kali.

Tabel 3.1.1.
Perkembangan PDRB Riau Tanpa dan Dengan Migas menurut Pengeluaran, 2000-2012
(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	Tanpa Migas			Dengan Migas		
	2000	2012	2012*)	2000	2012	2012*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	18.887	144.383	40.909	18.887	144.383	40.909
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	104	1.376	302	104	1.376	302
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.210	27.761	5.813	2.210	27.761	5.813
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.850	61.234	16.889	12.529	114.773	31.184
5. Perubahan Stok (residual)	-5.630	4.549	348	7.763	23.664	1.855
6. Ekspor	14.437	113.692	25.204	39.828	220.097	60.772
7. Impor	11.402	56.564	32.948	11.744	62.982	34.526
Total PDRB	22.456	296.432	56.517	69.577	469.073	106.309

*) Atas Dasar Harga Konstan 2000

Grafik 3.1.
 Nilai PDRB Riau Tanpa dan Dengan Migas menurut Pengeluaran
 atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000, 2012
 (Miliar Rp)



3.2. Distribusi PDRB Pengeluaran

Analisis distribusi dari setiap komponen PDRB menurut pengeluaran dapat menunjukkan gambaran seberapa besar suatu komponen pengeluaran mampu menyumbang terhadap pemanfaatan barang dan jasa, atau dengan kata lain dapat memperlihatkan komposisi setiap komponen pengeluaran di dalam perekonomian Riau. Sehingga informasi ini dapat bermanfaat bagi perencana dan pembuat kebijakan di tingkat eksekutif guna memacu perkembangan setiap komponen pengeluaran tersebut.

3.2.1. PDRB Pengeluaran tanpa Migas

Seperti terlihat pada Tabel 3.2.1. bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen yang dominan dalam memberikan kontribusinya terhadap PDRB Pengeluaran Riau tanpa migas selama periode 2008-2012. Artinya, bahwa perekonomian Riau masih digerakkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, bila terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat Riau maka akan berdampak luas terhadap perekonomian Riau.

Kemudian komponen pengeluaran lain yang termasuk besar dalam memberi kontribusi terhadap perekonomian Riau adalah komponen ekspor yang juga diikuti oleh komponen impor. Ini berarti output barang dan jasa yang dihasilkan oleh Riau telah mampu diekspor dengan memberi peran besar dalam mendapatkan devisa. Namun, kontribusi ekspor ini juga dibarengi oleh kontribusi impor yang relatif besar pula. Ini pertanda bahwa substitusi barang dan jasa tertentu belum sepenuhnya bisa diciptakan di Riau.

Selanjutnya, komponen pembentukan modal tetap bruto atau istilah lain dikenal sebagai investasi non finansial juga cukup besar perannya. Ini menunjukkan bahwa minat investor untuk menanamkan investasinya di Riau relatif besar.

Pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan kontribusi selanjutnya pada PDRB Riau, dimana sejak otonomisasi daerah dilaksanakan telah meningkat perannya. Peningkatan pada belanja aparatur dan publik menjadi salah satu faktor meningkatnya pengeluaran konsumsi pemerintah.

Tabel 3.2.1. memperlihatkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga cukup mendominasi struktur PDRB Riau menurut

pengeluaran tanpa migas dengan kontribusinya mencapai 48,71 persen di tahun 2012. Jika dilihat perkembangan persentase kontribusinya dari tahun 2008 sampai dengan 2010, angka persentase kontribusinya cenderung menunjukkan peningkatan. Sedangkan pada tahun 2011 dan 2012, kontribusi konsumsi rumah tangga cenderung menurun dan sudah dibawah angka 50 persen. Ada sedikit pergeseran struktur akibat meningkatnya kontribusi komponen PMTB dan ekspor luar negeri. Iklim investasi yang semakin baik memberikan angin segar bagi para investor dan produksi komoditas ekspor non migas menunjukkan penguatan pada tahun ini. Namun kondisi tersebut harus tetap dijaga agar dapat digali lagi segala potensi sumber daya yang ada agar komponen ini dapat lebih menggerakkan perekonomian Riau, misalkan menggali potensi komoditas unggulan ekspor baru dan menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk menarik para investor lain dan upaya untuk mengurangi impor.

Komponen berikutnya adalah ekspor dengan kontribusi sebesar 38,35 persen yang diikuti oleh komponen PMTB sebesar 20,66 persen di tahun 2012. Kontribusi ekspor dari tahun 2008 sampai dengan 2011 menunjukkan kecenderungan menurun setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2012

menunjukkan sedikit peningkatan. Pembentukan modal tetap bruto memberikan kontribusi sekitar 20 persen dan cenderung meningkat setiap tahunnya, namun tetap berada pada kisaran 20 persen. Pada tahun 2012, kontribusi PMTB mengalami sedikit peningkatan dari 20,39 persen menjadi 20,66 persen pada tahun 2012. Berbagai proyek kegiatan pembangunan fisik di setiap daerah Provinsi Riau terus berlanjut dan menunjukkan perkembangan yang nyata. Pembangunan ini tidak saja berupa pembukaan lahan atau daerah baru yang cukup marak di Riau, juga penyelesaian sarana dan prasarana untuk PON di Riau yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 dan berjalan dengan sukses, yaitu pembangunan jalan, jembatan, jalan layang, pelebaran pelabuhan udara Sultan Syarif Kasim II dan ikon-ikon Riau berupa tugu. Selain itu pembangunan seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal serta infrastruktur lain terus berlanjut menuju Riau maju dan sejahtera.

Komponen impor menempati urutan keempat dalam kontribusinya terhadap total PDRB. Kontribusinya dari tahun 2008 sampai dengan 2012 cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan pertanda baik bagi perekonomian Riau secara umum, berarti untuk beberapa komoditi tertentu sudah dapat memenuhi kebutuhan sendiri.

Namun kontribusinya tetap diatas 15 persen, karena ada keterkaitan antara ekspor dan impor. Untuk komoditas tertentu, ekspor akan meningkat jika bahan bakunya ditambah dengan impor dari luar. Perlu suatu kajian untuk meningkatkan produk bahan baku yang tidak tergantung dari impor. Sehingga kegiatan produksi yang menunjang ekspor tidak terganggu dengan berkurangnya impor. Penggalan komoditas ekspor baru selain kelapa sawit dan CPO-nya, *pulp and paper*, terus diupayakan agar ekspor non migas Riau lebih bergairah. Selain itu, harga komoditas ekspor non migas agar tetap dijaga stabilitasnya, sehingga para pengusaha yang bergerak pada komoditas tersebut tetap antusias dan optimis pada usahanya.

Ekspor dan impor dapat menjadi ukuran seberapa besar keterbukaan ekonomi suatu daerah terhadap daerah lain termasuk luar negeri, sehingga kedua komponen ini sangat penting untuk dianalisis. Ekspor biasanya disebut sebagai salah satu komponen dari sisi permintaan, sementara impor merupakan komponen dari sisi penawaran. Melalui kedua komponen ini dapat diketahui apakah suatu daerah mengalami surplus atau defisit, yang dapat dilihat dari neraca perdagangannya. Neraca perdagangan dikatakan surplus apabila nilai ekspor lebih

besar dari impor, sementara dikatakan defisit apabila terjadi sebaliknya.

Dalam kontribusinya terhadap PDRB Riau tanpa migas, ekspor neto pada tahun 2012, mengalami surplus sebesar 19,27 persen. Ekspor neto dapat dikatakan relatif stabil setiap tahunnya, dari tahun 2008 hingga 2012 memberi tanda bahwa kondisi ekspor Riau cukup baik dalam mengimbangi masuknya barang dan jasa ke Riau. Hal ini dapat dilihat dari ekspor neto Riau dari tahun 2008 ke 2012 persentasenya menunjukkan peningkatan, sebesar 11,18 persen tahun 2008 menjadi 19,27 persen pada tahun 2012.

Komponen konsumsi pemerintah berkontribusi sekitar 9,37 persen pada 2012. Kontribusi komponen ini dari tahun 2008 ke tahun 2012 menunjukkan kontribusi yang terus menurun, yaitu 12,26 persen pada tahun 2008 menjadi 9,37 persen pada tahun 2012. Kontribusi konsumsi pemerintah yang semakin menurun bukan disebabkan nilai konsumsi pemerintah yang semakin kecil, tetapi karena ada komponen lainnya yang memberikan kontribusi semakin besar, seperti komponen PMTB. Peran pemerintah masih cukup penting di dalam mengonsumsi (*final demand*) produksi yang tersedia di Riau. Pengeluaran konsumsi pemerintah

yang terus meningkat terutama pada belanja pegawai dan penyusutan belanja modal memberi dampak ”*Multiplier Effect*” bagi perekonomian Riau secara umum.

Sementara itu komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba dari tahun ke tahun relatif kecil hanya berkisar antara 0,44 persen sampai dengan 0,49 persen dan pada tahun 2012 sebesar 0,46 persen. Kontribusi komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba relatif kecil dan kontribusinya cenderung stabil. Dengan kontribusi yang kecil, sebaiknya perlu untuk memacu perkembangan berbagai organisasi, baik organisasi masyarakat, organisasi sosial budaya maupun sejenisnya, guna mendorong masyarakat berpartisipasi lebih aktif lagi di dalam pembangunan ekonomi.

Sesungguhnya, lembaga-lembaga masyarakat semacam ini dapat membantu pembangunan ekonomi Riau untuk segera mewujudkan Visi Riau 2020, dengan perkataan lain, tidak saja aspek ekonomi yang meningkat tetapi aspek sosial budaya juga harus turut bersinergi dalam memutar roda pembangunan daerah.

Tabel 3.2.1
Distribusi PDRB Riau Tanpa Migas menurut Pengeluaran
atas Dasar Harga Berlaku, 2008-2012
(%)

Komponen Pengeluaran	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50,54	50,92	51,20	50,66	48,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,44	0,49	0,46	0,46	0,46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,26	12,23	11,08	9,86	9,37
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	20,26	20,08	20,45	20,39	20,66
5. Perubahan Stok (Residual)	5,32	2,62	0,64	2,14	1,53
6. Ekspor	45,42	37,94	40,01	37,88	38,35
7. Impor	34,24	24,29	23,84	21,39	19,08
Total PDRB (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total PDRB (Miliar Rp)	149.125	179.037	214.655	253.391	296.432

Sumber: BPS Provinsi Riau

3.2.2. PDRB Pengeluaran dengan Migas

Dengan memasukkan unsur migas ke dalam perhitungan PDRB Pengeluaran Riau menyebabkan komposisi beberapa komponen pengeluaran mengalami perubahan. Misalnya di tahun 2010, pengeluaran konsumsi rumah tangga, bila sebelumnya berada di urutan pertama, dengan adanya unsur migas konsumsi rumah tangga menjadi menempati urutan kedua terbesar, sedangkan urutan pertama ditempati oleh komponen ekspor.

Kontribusi masing-masing komponen pengeluaran PDRB Riau dengan

migas selama periode 2008-2012 ditampilkan pada Tabel 3.2.2.

Dari tabel tersebut dapat diamati bahwa kontribusi ekspor selalu menempati urutan pertama selama periode tersebut. Kontribusi ekspor dari tahun 2008 sampai dengan 2012 berfluktuasi tetapi tetap pada kisaran 45,84 sampai dengan 60,45 persen. Sedangkan ekspor neto cenderung stabil berada pada kisaran 30,45 persen dan 42,95 persen.

Sementara itu kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga berfluktuasi namun cenderung stabil, yakni berada pada kisaran

27,27 persen dan 31,79 persen. Hal ini berarti, di satu sisi terdapat kelompok masyarakat dengan pengeluaran pendapatannya lebih untuk keperluan makanan, tetapi di sisi lain terdapat juga kelompok masyarakat dengan pengeluaran pendapatannya lebih untuk keperluan non makanan.

Selanjutnya, pembentukan modal tetap bruto memberikan kontribusi sebesar 24,47 persen pada 2012. Selama periode 2008 sampai dengan 2012, kontribusinya berfluktuatif, berkisar antara 22,24 persen dan 25,63 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan investasi fisik terus berlanjut di semua sektor seperti perkebunan, perikanan, perdagangan,

konstruksi dan untuk kegiatan eksplorasi migas. Kombinasi PMTB di sektor non migas dan migas menyebabkan kontribusi PMTB dengan migas mengalami peningkatan.

Komponen lain seperti konsumsi pemerintah memiliki kontribusi yang cenderung menurun selama periode 2008-2012, yakni berkisar antara 5,92 persen sampai dengan 7,37 persen. Penurunan kontribusi ini disebabkan ada komponen lain yang kontribusinya semakin meningkat. Pemerintah Daerah mempunyai nilai PAD yang cukup besar sehingga tersedia cukup dana untuk pembiayaan belanja aparatur, belanja barang dan penyusutan belanja modal.

Tabel 3.2.2
Distribusi PDRB Riau Dengan Migas menurut Pengeluaran
atas Dasar Harga Berlaku, 2008-2012
(%)

Komponen Pengeluaran	2008	2009	2010	2011	2012
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	27,27	30,68	31,79	31,03	30,78
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,24	0,29	0,29	0,28	0,29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,61	7,37	6,88	6,04	5,92
4. Pembentukan Modal tetap Bruto	22,24	24,50	25,63	24,53	24,47
5. Perubahan Stok (residual)	0,70	2,60	4,97	4,21	5,04
6. Ekspor	60,45	50,08	45,84	48,23	46,92
7. Impor	17,50	15,53	15,39	14,32	13,43
Total PDRB (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total PDRB (Miliar Rp)	276.400	297.173	345.774	413.706	469.073

Sumber : BPS Provinsi Riau

Konsumsi lembaga swasta nirlaba memiliki kontribusi yang sangat kecil yaitu dibawah satu persen. Kontribusi konsumsi lembaga swasta nirlaba berfluktuatif berkisar antara 0,24 persen dan 0,29 persen. Pada tahun 2012, kontribusi komponen ini sedikit meningkat dari 0,28 persen dari tahun 2011 menjadi 0,29 persen pada tahun 2012. Peningkatan kontribusi ini disebabkan adanya ajang besar yang digelar di Riau, yaitu PON XVIII, dimana aktifitas dari organisasi perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga dan hobi meningkat. Akan tetapi dengan porsi di bawah satu persen rasanya perlu untuk lebih memperhatikan lembaga ini sehingga partisipasi dan peran pembangunan daerah dari lembaga ini ikut memberi arti.

3.3. Pertumbuhan PDRB Pengeluaran

Capaian kinerja setiap komponen PDRB menurut pengeluaran perlu diamati untuk mengetahui komponen mana saja yang memiliki laju pertumbuhan tinggi, sedang, dan rendah. Dengan mengetahui hal ini, akan dapat dicermati komponen yang memiliki kemampuan untuk menjadi motor penggerak ekonomi di Riau, sehingga kebijakan yang akan diambil oleh pembuat keputusan dan *stakeholders* bisa berjalan

secara efektif dan efisien menuju tingkat pencapaian yang diinginkan oleh Visi Riau 2020.

3.3.1. PDRB Pengeluaran Tanpa Migas

Mengamati Tabel 3.3.1 terlihat bahwa dari sisi permintaan (*demand side*) laju pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas pada tahun 2012 tumbuh sebesar 7,82 persen. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,76 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PMTB sebesar 12,97 persen, selanjutnya diikuti ekspor sebesar 8,58 persen dan konsumsi rumahtangga sebesar 6,93 persen. Komponen Lembaga Swasta Nirlaba sebesar 6,38 persen. Komponen impor tumbuh sebesar 5,95 persen dan pengeluaran komponen pemerintah tumbuh sebesar 2,41 persen. Dengan kondisi pertumbuhan tiga terbesar oleh komponen PMTB, ekspor, dan pengeluaran konsumsi rumahtangga, mampu mendorong roda perekonomian Riau. Tetapi hal tersebut perlu mendapat perhatian, karena dengan meningkatnya PMTB dan ekspor, impor Riau juga tinggi. Hal ini berarti Riau masih tergantung dengan daerah luar untuk memenuhi kebutuhan domestiknya untuk beberapa komoditi tertentu. Selain itu, pada perhitungan PDRB

menurut pengeluaran kontribusi impor merupakan pengurang.

3.3.2. PDRB Pengeluaran Dengan Migas

Masih mengacu pada Tabel 3.3.1, apabila unsur migas dimasukkan ke dalam penghitungan PDRB menurut pengeluaran akan terlihat bahwa laju pertumbuhan menjadi berbeda namun tetap menunjukkan angka positif. Laju pertumbuhan PDRB Riau tahun 2012 sebesar **3,55** persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, laju pertumbuhan di tahun 2012 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2011 laju pertumbuhan sebesar **5,04** persen.

Dari ke-3 komponen pengeluaran yang mempengaruhi PDRB dengan migas adalah komponen PMTB, ekspor, dan impor. Komponen pembentukan modal tetap bruto tumbuh sebesar **5,83** persen pada tahun 2012. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, pertumbuhan komponen ini di tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan yang melambat, dimana pada tahun 2011 mampu tumbuh sebesar **8,36** persen.

Komponen ekspor tumbuh sebesar **4,15** persen pada tahun 2012, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2011 sebesar **6,33** persen. Pertumbuhan ekspor didorong oleh komoditas migas dan non migas. Komoditi migas utama yang

menggerakkan pertumbuhan ekspor adalah minyak mentah, sedangkan komoditi non migas adalah lemak & minyak hewan/nabati. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia menurun pada tahun 2012 jika dibandingkan tahun 2011, yaitu US\$ 111,55 per barel pada tahun 2011 menjadi US\$ 106,90 per barel pada tahun 2012 (Desember 2012) diperkirakan menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan ekspor migas. Disamping itu sumberdaya alam minyak mentah yang semakin berkurang menjadikan produksi minyak Riau juga semakin berkurang.

Pertumbuhan komponen impor tahun 2012 sebesar **6,70** persen, jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011 sebesar **6,92** persen, pertumbuhan impor cenderung stabil. Komoditi impor migas yang mendorong pertumbuhan impor adalah impor hasil minyak, sedangkan komoditi non migas didominasi oleh impor pupuk dan mesin-mesin/pesawat mekanik.

Produksi migas Riau yang cenderung menurun menyebabkan kegiatan eksplorasi terus dilakukan dalam upaya mencari sumber sumur minyak baru disamping penggantian peralatan yang sudah usang dan penerapan teknologi baru untuk peningkatan kapasitas produksi. Tetapi karena sumber daya alam minyak mentah yang semakin

berkurang menyebabkan kegiatan tersebut tidak segenyar seperti sebelumnya. Hal ini diperkirakan menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan di komponen pembentukan modal tetap bruto.

Pada Desember 2012, harga rata-rata minyak mentah Indonesia US\$ 106,90 per barel lebih rendah dari tahun 2011,

penurunan harga ini dapat menyebabkan penekanan produksi minyak. Tetapi karena kebutuhan minyak dunia termasuk Riau/Indonesia yang semakin besar menyebabkan upaya-upaya tetap dilakukan agar produksi migas tetap stabil, sehingga kebutuhan domestik terpenuhi dan tersedia cadangan untuk ekspor.

Tabel 3.3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Riau menurut Pengeluaran, 2011-2012
(%)

Komponen Pengeluaran	Tanpa Migas		Dengan Migas	
	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,97	6,93	6,97	6,93
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	6,43	6,38	6,43	6,38
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,47	2,41	2,47	2,41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,81	12,97	8,36	5,83
5. Perubahan Stok (Residual)	-	-	-	-
6. Ekspor	4,82	8,58	6,33	4,15
7. Impor	8,86	5,95	6,92	6,70
Total PDRB	7,76	7,82	5,04	3,55

Sumber: BPS Provinsi Riau

3.4. Keterkaitan PMTB dengan PDRB dan Ekspor

Keterkaitan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat digambarkan dengan ukuran Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR merupakan suatu indikator tentang besarnya tambahan kapital

(investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output baik secara fisik maupun nominal. Namun dalam praktek, untuk memudahkan penghitungannya dilakukan dalam bentuk nilai yang diukur dengan harga konstan. Ukuran ini merupakan rasio antara pertambahan kapital (PMTB dan perubahan stok) terhadap pertambahan

output (PDRB). ICOR sekaligus mencerminkan tingkat efisiensi dalam memproduksi. Semakin tinggi nilai ICOR suatu Provinsi, semakin tidak efisien Provinsi tersebut dalam memproduksi.

Sementara, keterkaitan PMTB dan ekspor yang digambarkan melalui rasio antara PMTB dengan ekspor merupakan gambaran seberapa besar peran investasi untuk menghasilkan ekspor. Semakin besar peran tersebut, semakin berperan PMTB atau

investasi dalam meningkatkan ekspor, yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

ICOR Riau tanpa migas selama periode 2008-2012, seperti pada Tabel 3.4.1., memperlihatkan bahwa angka ICOR pada tahun 2008 sebesar 3,31 menjadi 3,65 pada tahun 2012. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketidakefisiensinya investasi meningkat tetapi tingkat efisiensi masih terjaga dalam batas kewajaran.

Tabel 3.4.1
Rasio PMTB/Ekspor dan ICOR Riau, 2008-2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanpa Migas					
1. Rasio PMTB/Ekspor (%)	54,53	56,70	61,48	64,41	67,01
2. ICOR	3,31	4,10	3,67	3,61	3,65
Dengan Migas					
1. Rasio PMTB/Ekspor (%)	40,87	46,30	49,55	50,49	51,31
2. ICOR	4,30	8,70	6,26	5,52	8,09

Sementara nilai ICOR dengan migas cenderung berfluktuasi selama periode 2008-2012, yaitu berada pada kisaran 4,30 sampai dengan 8,70. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan tiap tahun belum tentu memberikan penambahan NTB atau tidak efisien. Menurut Widodo (1990) secara umum nilai ICOR yang menunjukkan

produktivitas investasi yang baik antara 3-4, semakin tinggi ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadi inefisiensi dalam pengeluaran investasi. ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam pengeluaran modal.

Tabel 3.4.1 memperlihatkan rasio PMTB terhadap ekspor tanpa migas selama

periode 2008-2012. Tabel tersebut menunjukkan ratio yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2008 tercatat rasio sebesar 54,53 persen dan pada tahun 2012 sebesar 67,01 persen.

Begitu juga rasio PMTB terhadap ekspor dengan migas juga memperlihatkan

peningkatan setiap tahunnya, yaitu sebesar 40,87 persen tahun 2008, sebesar 46,30 persen tahun 2009, sebesar 49,55 persen tahun 2010, sebesar 50,49 persen tahun 2011, dan sebesar 51,31 persen pada tahun 2012.

<http://riau.bps.go.id>

<http://riau.bps.go.id>



Lampiran

Tabel-tabel Pokok

TABEL 1.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI RIAU
TANPA MIGAS MENURUT PENGELUARAN, 2008-2012
(Juta Rp)

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Atas Dasar Harga Berlaku					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	75,368,701.53	91,172,123.52	109,904,754.64	128,359,433.76	144,382,787.05
a. Makanan	30,993,939.20	37,453,539.61	44,851,544.23	53,247,114.10	60,684,521.47
b. Bukan makanan	44,374,762.33	53,718,583.91	65,053,210.41	75,112,319.66	83,698,265.58
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	655,516.45	876,382.60	995,678.22	1,171,775.74	1,376,308.75
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18,276,369.25	21,902,190.47	23,773,764.25	24,993,360.62	27,761,489.34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,216,366.45	35,954,996.13	43,905,405.56	51,660,949.19	61,234,287.66
5. Perubahan Stok	7,937,813.54	4,698,486.99	1,367,270.32	5,425,373.67	4,548,893.63
6. E k s p o r	67,727,869.34	67,928,553.18	85,873,087.28	95,985,536.43	113,691,733.25
a. Antar Negara	63,467,388.61	62,940,158.80	80,242,396.56	90,637,943.79	107,336,960.75
b. Antar Daerah	4,260,480.73	4,988,394.37	5,630,690.72	5,347,592.64	6,354,772.50
7. I m p o r	51,057,394.37	43,495,410.27	51,164,769.80	54,205,102.65	56,563,534.19
a. Antar Negara	27,771,869.31	17,878,595.63	20,899,199.09	22,373,668.59	22,497,646.64
b. Antar Daerah	23,285,525.06	25,616,814.64	30,265,570.71	31,831,434.06	34,065,887.55
J U M L A H	149,125,242.19	179,037,322.61	214,655,190.46	253,391,326.75	296,431,965.49
B. Atas Dasar Harga Konstan 2000					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	30,636,067.23	33,163,412.97	35,762,518.13	38,256,155.16	40,909,095.14
a. Makanan	10,463,928.63	11,359,130.78	12,046,031.41	12,828,108.05	13,997,036.28
b. Bukan makanan	20,172,138.60	21,804,282.19	23,716,486.71	25,428,047.11	26,912,058.86
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	224,533.41	269,969.26	266,455.48	283,591.30	301,672.50
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,976,876.79	5,418,574.76	5,539,579.78	5,676,552.50	5,813,171.15
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,260,941.90	11,924,255.68	13,614,583.80	14,950,818.46	16,889,334.57
5. Perubahan Stok	496,170.32	371,468.70	-115,925.07	1,139,139.02	348,007.24
6. E k s p o r	20,650,328.21	21,028,759.20	22,144,525.65	23,212,450.35	25,204,513.25
a. Antar Negara	18,199,929.34	18,604,390.49	19,634,100.52	20,568,015.95	22,290,808.19
b. Antar Daerah	2,450,398.87	2,424,368.71	2,510,425.13	2,644,434.39	2,913,705.06
7. I m p o r	25,647,987.37	26,784,496.67	28,566,812.55	31,098,606.06	32,948,418.72
a. Antar Negara	10,294,057.66	10,518,181.42	11,549,225.52	12,468,998.78	12,620,479.97
b. Antar Daerah	15,353,929.71	16,266,315.25	17,017,587.03	18,629,607.28	20,327,938.75
J U M L A H	42,596,930.48	45,391,943.91	48,644,925.21	52,420,100.73	56,517,375.14

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sangat Sementara

TABEL 2.
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI RIAU
TANPA MIGAS MENURUT PENGELUARAN, 2008-2012
 (%)

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Atas Dasar Harga Berlaku					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	50.54	50.92	51.20	50.66	48.71
a. Makanan	20.78	20.92	20.89	21.01	20.47
b. Bukan makanan	29.76	30.00	30.31	29.64	28.24
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0.44	0.49	0.46	0.46	0.46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12.26	12.23	11.08	9.86	9.37
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	20.26	20.08	20.45	20.39	20.66
5. Perubahan Stok	5.32	2.62	0.64	2.14	1.53
6. E k s p o r	45.42	37.94	40.01	37.88	38.35
a. Antar Negara	42.56	35.15	37.38	35.77	36.21
b. Antar Daerah	2.86	2.79	2.62	2.11	2.14
7. I m p o r	34.24	24.29	23.84	21.39	19.08
a. Antar Negara	18.62	9.99	9.74	8.83	7.59
b. Antar Daerah	15.61	14.31	14.10	12.56	11.49
J U M L A H	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
B. Atas Dasar Harga Konstan 2000					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	71.92	73.06	73.52	72.98	72.38
a. Makanan	24.56	25.02	24.76	24.47	24.77
b. Bukan makanan	47.36	48.04	48.75	48.51	47.62
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0.53	0.59	0.55	0.54	0.53
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11.68	11.94	11.39	10.83	10.29
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	26.44	26.27	27.99	28.52	29.88
5. Perubahan Stok	1.16	0.82	-0.24	2.17	0.62
6. E k s p o r	48.48	46.33	45.52	44.28	44.60
a. Antar Negara	42.73	40.99	40.36	39.24	39.44
b. Antar Daerah	5.75	5.34	5.16	5.04	5.16
7. I m p o r	60.21	59.01	58.73	59.33	58.30
a. Antar Negara	24.17	23.17	23.74	23.79	22.33
b. Antar Daerah	36.04	35.84	34.98	35.54	35.97
J U M L A H	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Keterangan: *) Angka Perbaikan
 **) Angka Sangat Sementara

TABEL 3.
INDEKS PERKEMBANGAN PDRB PROVINSI RIAU
TANPA MIGAS MENURUT PENGELUARAN, 2008-2012

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Atas Dasar Harga Berlaku					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	399.06	482.73	581.92	679.63	764.47
a. Makanan	488.42	590.22	706.80	839.10	956.31
b. Bukan makanan	353.84	428.35	518.73	598.94	667.40
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	629.75	841.94	956.54	1,125.72	1,322.21
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	826.98	991.05	1,075.73	1,130.92	1,256.17
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	784.79	933.83	1,140.32	1,341.75	1,590.39
5. Perubahan Stok	-140.99	-83.45	-24.29	-96.36	-80.80
6. E k s p o r	469.13	470.52	594.82	664.87	787.51
a. Antar Negara	473.02	469.09	598.04	675.52	799.97
b. Antar Daerah	418.02	489.44	552.46	524.68	623.50
7. I m p o r	447.80	381.48	448.74	475.41	496.09
a. Antar Negara	367.83	236.80	276.81	296.34	297.98
b. Antar Daerah	604.55	665.07	785.77	826.42	884.43
J U M L A H	664.08	797.29	955.90	1,128.40	1,320.07
B. Atas Dasar Harga Konstan 2000					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	162.21	175.59	189.35	202.56	216.60
a. Makanan	164.90	179.00	189.83	202.15	220.57
b. Bukan makanan	160.85	173.87	189.11	202.76	214.59
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	215.71	259.36	255.98	272.44	289.81
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	225.20	245.18	250.66	256.86	263.04
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	292.47	309.70	353.60	388.31	438.65
5. Perubahan Stok	-8.81	-6.60	2.06	-20.23	-6.18
6. E k s p o r	143.04	145.66	153.39	160.79	174.59
a. Antar Negara	135.64	138.66	146.33	153.29	166.13
b. Antar Daerah	240.42	237.87	246.31	259.46	285.88
7. I m p o r	224.95	234.91	250.55	272.75	288.97
a. Antar Negara	136.34	139.31	152.97	165.15	167.16
b. Antar Daerah	398.63	422.31	441.82	483.67	527.76
J U M L A H	189.69	202.14	216.62	233.44	251.68

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sangat Sementara

TABEL 4.
INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI RIAU
TANPA MIGAS MENURUT PENGELUARAN, 2008-2012

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Atas Dasar Harga Berlaku					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	132.45	120.97	120.55	116.79	112.48
a. Makanan	154.09	120.84	119.75	118.72	113.97
b. Bukan makanan	120.62	121.06	121.10	115.46	111.43
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	114.49	133.69	113.61	117.69	117.45
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	118.16	119.84	108.55	105.13	111.08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	132.21	118.99	122.11	117.66	118.53
5. Perubahan Stok	123.84	59.19	29.10	396.80	83.84
6. E k s p o r	134.38	100.30	126.42	111.78	118.45
a. Antar Negara	135.01	99.17	127.49	112.96	118.42
b. Antar Daerah	125.62	117.09	112.88	94.97	118.83
7. I m p o r	143.52	85.19	117.63	105.94	104.35
a. Antar Negara	187.83	64.38	116.90	107.06	100.55
b. Antar Daerah	112.00	110.01	118.15	105.17	107.02
J U M L A H	127.42	120.06	119.89	118.05	116.99
B. Atas Dasar Harga Konstan 2000					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	108.23	108.25	107.84	106.97	106.93
a. Makanan	107.80	108.56	106.05	106.49	109.11
b. Bukan makanan	108.45	108.09	108.77	107.22	105.84
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	107.74	120.24	98.70	106.43	106.38
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	108.21	108.88	102.23	102.47	102.41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	107.01	105.89	114.18	109.81	112.97
5. Perubahan Stok	-144.32	74.87	-31.21	-982.65	30.55
6. E k s p o r	106.03	101.83	105.31	104.82	108.58
a. Antar Negara	105.92	102.22	105.53	104.76	108.38
b. Antar Daerah	106.87	98.94	103.55	105.34	110.18
7. I m p o r	109.85	104.43	106.65	108.86	105.95
a. Antar Negara	110.45	102.18	109.80	107.96	101.21
b. Antar Daerah	109.45	105.94	104.62	109.47	109.12
J U M L A H	108.06	106.56	107.17	107.76	107.82

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sangat Sementara

TABEL 5.
INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI RIAU
TANPA MIGAS MENURUT PENGELUARAN, 2008-2012

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	246.01	274.92	307.32	335.526	352.936
a. Makanan	296.20	329.72	372.33	415.082	433.553
b. Bukan makanan	219.98	246.37	274.30	295.392	311.007
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	291.95	324.62	373.68	413.192	456.226
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	367.23	404.21	429.16	440.291	477.562
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	268.33	301.53	322.49	345.539	362.562
5. Perubahan Stok	1,599.82	1,264.84	-1,179.44	476.270	1307.126
6. Ekspor	327.97	323.03	387.78	413.509	451.077
a. Antar Negara	348.72	338.31	408.69	440.674	481.530
b. Antar Daerah	173.87	205.76	224.29	202.221	218.099
7. Impor	199.07	162.39	179.11	174.301	171.673
a. Antar Negara	269.79	169.98	180.96	179.434	178.263
b. Antar Daerah	151.66	157.48	177.85	170.865	167.582
J U M L A H	350.08	394.43	441.27	483.39	524.50

Keterangan: *) Angka Perbaikan
 **) Angka Sangat Sementara

TABEL 6.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI RIAU
TERMASUK MIGAS MENURUT PENGELUARAN, 2008-2012
(Juta Rp)

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Atas Dasar Harga Berlaku					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	75,368,701.53	91,172,123.52	109,904,754.64	128,359,433.76	144,382,787.05
a. Makanan	30,993,939.20	37,453,539.61	44,851,544.23	53,247,114.10	60,684,521.47
b. Bukan makanan	44,374,762.33	53,718,583.91	65,053,210.41	75,112,319.66	83,698,265.58
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	655,516.45	876,382.60	995,678.22	1,171,775.74	1,376,308.75
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18,276,369.25	21,902,190.47	23,773,764.25	24,993,360.62	27,761,489.34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	61,464,689.44	72,806,509.76	88,613,093.64	101,465,265.55	114,773,158.18
5. Perubahan Stok	1,926,927.37	7,733,293.89	17,197,937.64	17,414,498.14	23,663,939.42
6. E k s p o r	167,078,232.74	148,820,987.10	158,508,103.42	199,529,793.31	220,097,073.39
a. Antar Negara	152,066,478.51	131,287,244.27	139,919,853.76	178,016,806.07	193,669,103.16
b. Antar Daerah	15,011,754.23	17,533,742.82	18,588,249.66	21,512,987.24	26,427,970.23
7. I m p o r	48,370,306.81	46,138,459.01	53,219,518.01	59,246,404.31	62,981,733.18
a. Antar Negara	23,113,085.20	19,339,362.87	22,472,929.70	24,632,967.89	23,964,217.56
b. Antar Daerah	25,257,221.61	26,799,096.14	30,746,588.31	34,613,436.42	39,017,515.62
J U M L A H	276,400,129.95	297,173,028.31	345,773,813.79	413,706,122.80	469,073,022.96
B. Atas Dasar Harga Konstan 2000					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	30,636,067.23	33,163,412.97	35,762,518.13	38,256,155.16	40,909,095.14
a. Makanan	10,463,928.63	11,359,130.78	12,046,031.41	12,828,108.05	13,997,036.28
b. Bukan makanan	20,172,138.60	21,804,282.19	23,716,486.71	25,428,047.11	26,912,058.86
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	224,533.41	269,969.26	266,455.48	283,591.30	301,672.50
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,976,876.79	5,418,574.76	5,539,579.78	5,676,552.50	5,813,171.15
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	23,002,235.64	25,076,550.00	27,192,328.95	29,464,769.17	31,184,013.48
5. Perubahan Stok	2,189,379.71	3,554,416.21	4,360,952.27	2,992,545.93	1,855,044.67
6. E k s p o r	56,280,719.72	54,154,493.33	54,878,037.96	58,351,916.27	60,771,771.25
a. Antar Negara	53,175,933.68	50,754,097.61	51,316,542.76	54,517,932.81	56,562,531.58
b. Antar Daerah	3,104,786.03	3,400,395.72	3,561,495.20	3,833,983.46	4,209,239.67
7. I m p o r	26,224,430.68	27,851,179.96	30,264,274.06	32,359,566.68	34,526,040.82
a. Antar Negara	10,578,629.34	10,883,235.41	12,413,497.94	13,153,536.11	13,706,413.99
b. Antar Daerah	15,645,801.33	16,967,944.55	17,850,776.12	19,206,030.58	20,819,626.83
J U M L A H	91,085,381.81	93,786,236.58	97,735,598.51	102,665,963.65	106,308,727.37

Keterangan: *) Angka Perbaikan
 **) Angka Sangat Sementara

TABEL 7.
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI RIAU TERMASUK
MIGAS MENURUT PENGELUARAN, 2008-2012
 (%)

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Atas Dasar Harga Berlaku					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	27.27	30.68	31.79	31.03	30.78
a. Makanan	11.21	12.60	12.97	12.87	12.94
b. Bukan makanan	16.05	18.08	18.81	18.16	17.84
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0.24	0.29	0.29	0.28	0.29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.61	7.37	6.88	6.04	5.92
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	22.24	24.50	25.63	24.53	24.47
5. Perubahan Stok	0.70	2.60	4.97	4.21	5.04
6. E k s p o r	60.45	50.08	45.84	48.23	46.92
a. Antar Negara	55.02	44.18	40.47	43.03	41.29
b. Antar Daerah	5.43	5.90	5.38	5.20	5.63
7. I m p o r	17.50	15.53	15.39	14.32	13.43
a. Antar Negara	8.36	6.51	6.50	5.95	5.11
b. Antar Daerah	9.14	9.02	8.89	8.37	8.32
J U M L A H	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
A. Atas Dasar Harga Konstan 2000					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	33.63	35.36	36.59	37.26	38.48
a. Makanan	11.49	12.11	12.33	12.49	13.17
b. Bukan makanan	22.15	23.25	24.27	24.77	25.32
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0.25	0.29	0.27	0.28	0.28
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.46	5.78	5.67	5.53	5.47
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	25.25	26.74	27.82	28.70	29.33
5. Perubahan Stok	2.40	3.79	4.46	2.91	1.74
6. E k s p o r	61.79	57.74	56.15	56.84	57.17
a. Antar Negara	58.38	54.12	52.51	53.10	53.21
b. Antar Daerah	3.41	3.63	3.64	3.73	3.96
7. I m p o r	28.79	29.70	30.97	31.52	32.48
a. Antar Negara	11.61	11.60	12.70	12.81	12.89
b. Antar Daerah	17.18	18.09	18.26	18.71	19.58
JENIS PENGELUARAN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Keterangan: *) Angka Perbaikan
 **) Angka Sangat Sementara

TABEL 8.
INDEKS PERKEMBANGAN PDRB PROVINSI RIAU
TERMASUK MIGAS MENURUT PENGELUARAN, 2008-2012

R I N C I A N	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Atas Dasar Harga Berlaku					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	399.06	482.73	581.92	679.63	764.47
a. Makanan	488.42	590.22	706.80	839.10	956.31
b. Bukan makanan	353.84	428.35	518.73	598.94	667.40
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	629.75	841.94	956.54	1,125.72	1,322.21
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	826.98	991.05	1,075.73	1,130.92	1,256.17
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	490.59	581.12	707.29	809.87	916.09
5. Perubahan Stok	24.82	99.61	221.53	224.32	304.81
6. E k s p o r	419.50	373.66	397.98	500.98	552.62
a. Antar Negara	399.45	344.86	367.54	467.61	508.73
b. Antar Daerah	853.54	996.94	1,056.89	1,223.19	1,502.65
7. I m p o r	411.88	392.38	453.17	504.49	536.30
a. Antar Negara	293.23	245.36	285.11	312.52	304.03
b. Antar Daerah	654.05	693.97	796.20	896.33	1,010.38
J U M L A H	397.26	427.11	496.97	594.60	674.18
B. Atas Dasar Harga Konstan 2000					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	162.21	175.59	189.35	202.56	216.60
a. Makanan	164.90	179.00	189.83	202.15	220.57
b. Bukan makanan	160.85	173.87	189.11	202.76	214.59
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	215.71	259.36	255.98	272.44	289.81
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	225.20	245.18	250.66	256.86	263.04
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	183.60	200.15	217.04	235.18	248.90
5. Perubahan Stok	28.20	45.78	56.17	38.55	23.89
6. E k s p o r	141.31	135.97	137.79	146.51	152.59
a. Antar Negara	139.68	133.32	134.80	143.21	148.58
b. Antar Daerah	176.53	193.34	202.50	217.99	239.33
7. I m p o r	223.30	237.16	257.70	275.55	293.99
a. Antar Negara	134.21	138.08	157.49	166.88	173.89
b. Antar Daerah	405.16	439.39	462.25	497.35	539.13
J U M L A H	130.91	134.79	140.47	147.56	152.79

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sangat Sementara

TABEL 9.
INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI RIAU
TERMASUK MIGAS MENURUT PENGELUARAN, 2008-2012

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Atas Dasar Harga Berlaku					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	132.45	120.97	120.55	116.79	112.48
a. Makanan	154.09	120.84	119.75	118.72	113.97
b. Bukan makanan	120.62	121.06	121.10	115.46	111.43
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	114.49	133.69	113.61	117.69	117.45
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	118.16	119.84	108.55	105.13	111.08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	127.21	118.45	121.71	114.50	113.12
5. Perubahan Stok	17.84	401.33	222.39	101.26	135.89
6. E k s p o r	144.67	89.07	106.51	125.88	110.31
a. Antar Negara	138.01	86.34	106.58	127.23	108.79
b. Antar Daerah	283.08	116.80	106.01	115.73	122.85
7. I m p o r	128.82	95.39	115.35	111.32	106.30
a. Antar Negara	139.06	83.67	116.20	109.61	97.29
b. Antar Daerah	120.68	106.10	114.73	112.58	112.72
J U M L A H	131.62	107.52	116.35	119.65	113.38
B. Atas Dasar Harga Konstan 2000					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	108.23	108.25	107.84	106.97	106.93
a. Makanan	107.80	108.56	106.05	106.49	109.11
b. Bukan makanan	108.45	108.09	108.77	107.22	105.84
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	107.74	120.24	98.70	106.43	106.38
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	108.21	108.88	102.23	102.47	102.41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	109.72	109.02	108.44	108.36	105.83
5. Perubahan Stok	62.11	162.35	122.69	68.62	61.99
6. E k s p o r	106.69	96.22	101.34	106.33	104.15
a. Antar Negara	106.62	95.45	101.11	106.24	103.75
b. Antar Daerah	107.96	109.52	104.74	107.65	109.79
7. I m p o r	108.62	106.20	108.66	106.92	106.70
a. Antar Negara	106.15	102.88	114.06	105.96	104.20
b. Antar Daerah	110.36	108.45	105.20	107.59	108.40
J U M L A H	105.65	102.97	104.21	105.04	103.55

Keterangan: *) Angka Perbaikan

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 10.
INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI RIAU
TERMASUK MIGAS MENURUT PENGELUARAN, 2008-2012

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	246.01	274.92	307.32	335.53	352.94
a. Makanan	296.20	329.72	372.33	415.08	433.55
b. Bukan makanan	219.98	246.37	274.30	295.39	311.01
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	291.95	324.62	373.68	413.19	456.23
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	367.23	404.21	429.16	440.29	477.56
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	267.21	290.34	325.88	344.36	368.05
5. Perubahan Stok	88.01	217.57	394.36	581.93	1275.65
6. E k s p o r	296.87	274.81	288.84	341.94	362.17
a. Antar Negara	285.97	258.67	272.66	326.53	342.40
b. Antar Daerah	483.50	515.64	521.92	561.11	627.86
7. I m p o r	184.45	165.66	175.85	183.09	182.42
a. Antar Negara	218.49	177.70	181.04	187.27	174.84
b. Antar Daerah	161.43	157.94	172.24	180.22	187.41
J U M L A H	303.45	316.86	353.78	402.96	441.24

Keterangan: *) Angka Perbaikan
 **) Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://riau.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU

Jl. Pattimura No. 12 Pekanbaru – Riau, 28131

Telepon: (0761) 23042 – 21336. Fax: (0761) 21336

E-mail: bps1400@bps.go.id